

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Tidak bisa disangkal bahwa negara Indonesia memiliki struktur masyarakat yang memiliki keberagaman ras, budaya, etnis, agama serta aliran kepercayaan lainnya. Bahwasannya Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk dan pluralistis, hal ini terlihat dari pluralitas suku, agama, ras, etnis, kepercayaan, maupun golongan yang dimiliki masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Konstruksi sosial yang terbentuk itu merupakan bentuk pengejawantahan pluralisme bangsa Indonesia yang telah dikemas dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut bukan sekadar fakta kekinian melainkan sudah ada sejak terbentuknya negara Indonesia yang menyatu dan menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan tersebut berfungsi bukan hanya semata-mata sebagai dasar negara yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi, tetapi lebih dari pada itu menjadi alat pemersatu bangsa dari disintegrasi yang menjadi realitas bangsa dewasa ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 238 juta orang. Negara kepulauan ini terdiri dari 17.000 pulau yang menjadi tempat atau rumah bagi 1.211 bahasa yang terdiri dari berbagai macam etnis.<sup>2</sup> Selain beragamnya bahasa, agama yang dianut juga sangat beragam. Sekitar 86,88% beragama Islam, 7,49%, Kristen, 3,09%, Katolik, 1,71%, Hindu, 0,75%, Budha, 0,03%, Konghucu, dan sebanyak 0,04% menganut aliran kepercayaan lainnya.<sup>3</sup> Beragamnya agama dan aliran kepercayaan masyarakat tersebut tersebar hampir di seluruh bumi

---

<sup>1</sup>Franz Magnis-Suseno, *Pluralisme dalam Kebangsaan, Demokrasi dan Pluralisme. Bunga Rampai Etika Politik Aktual* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015), hlm. 92.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Indonesia 2010”, dalam *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/statistik-indonesia-2010.html> diakses, 20 Agustus 2022.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Indonesia. Dari beragamanya agama tersebut populasi Islam mendapat tempat pertama untuk pemeluk yang paling banyak.

Bangsa yang besar, majemuk dan pluralistis seperti Indonesia harus mengakui bahwa persoalan atau tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat tidak terluput dari isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Persoalan disintegrasi menjadi fakta aktual yang seringkali muncul dalam kehidupan negara yang multikultural. Hal ini ditandai dengan menguatnya sentimen “*primordialisme*”<sup>4</sup> yang sudah merambah dan menjamah ke segala sektor kehidupan masyarakat. Wacana menguatnya sentimen primordialisme semakin terlihat ketika kontestasi politik di tanah air sudah dimulai. Proses kontestasi politik di Indonesia lazimnya menggunakan atribut-atribut agama, suku, dan ras sebagai wacana untuk memonopoli dukungan massa. Adanya politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membentuk arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok tertentu dengan memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Oleh karena itu, kemajemukan yang menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam, karena praktik politik identitas bisa menghancurkan integritas kehidupan berdemokrasi yang telah lama di pertahankan.

Politik identitas merupakan sebuah fenomena politik yang terjadi pada masyarakat di belahan dunia mana pun baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Politik identitas tersebut tampil dengan berbagai pola dan karakteristik sesuai dengan konteks yang terjadi di negara tersebut. Agnes Heller

---

<sup>4</sup>*Primordialisme* berasal dari kata bahasa Latin “*primus*” artinya “pertama” dan “*ordini*” yang artinya “tenunan” atau “ikatan”. Secara sederhana, *primordialisme* dapat diartikan sebagai perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap *etnosentrisme*, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Bdk. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, “*Primordialisme*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme>, diakses pada 22 Agustus 2022.

melihat bahwa, politik identitas merupakan gerakan politik yang menempatkan perbedaan sebagai kategori politik utama (*politics of difference*).<sup>5</sup> Politik identitas memproyeksikan dan berimplikasi pada suatu praktik meniadakan orang lain dalam suatu kategori identitas yang sama. Dari definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa, politik identitas dapat dilihat sebagai politik perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dengan berbagai kepentingannya.

Tentang hal ini kita dapat berkaca dari bangunan teori Huntington di dalam bukunya “Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia” dan juga tesis Fukuyama tentang kebangkitan politik identitas pada abad ke-21, yang menyatakan akan ada berbagai benturan peradaban yang dipicu oleh masalah politik identitas, sektarianisme, dan intoleransi agama.<sup>6</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa, fenomena politik identitas dapat tumbuh subur di dalam situasi politik yang demokratis. Menurut Fukuyama, setiap kelompok memiliki hak untuk diperlakukan lebih tinggi, sehingga mengeksklusi dan memarginalkan kelompok lain. Tidak jarang konflik-konflik yang terjadi melibatkan masyarakat justru disebabkan oleh politik identitas. Hal ini juga dinyatakan secara gamblang oleh Mahpudin;

Politik identitas akan terus menjadi ancaman yang serius. Demokrasi liberal telah ikut berkontribusi menajamkan politik identitas dan tuntutan atas pengakuan identitas kelompok yang berujung pada konflik, ujaran kebencian dan tindakan kekerasan. Kasus-kasus kekerasan atas nama identitas baik etnis maupun agama terjadi di negara maju maupun berkembang. Ihwal ini telah diprediksi oleh Huntington bahwa pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan kematian ideologi sebagai doktrin politik, dunia selama abad ke-21 akan dihiasi oleh benturan peradaban yang dipicu oleh masalah politik identitas, sektarianisme dan intoleransi agama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mahpudin “Demokrasi dan Kabangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru”. *International Journal of Demos (IJD)*, 1:1, (April 2019), hlm. 4.

<sup>6</sup>Francis Fukuyama, *Identitas; Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian*, penerj. Wisnu Prasetya Utama (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2018), hlm. Vi-xiv.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

Dari tahun 1998 sampai sekarang, isu-isu politik identitas di dalam panggung perpolitikan di Indonesia masih hangat dan menghiasi wajah negara ini. Praktik politik identitas ini bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Pemilihan calon presiden periode 2019-2024 yang mengkontestasikan dua pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno merupakan suatu fenomena adanya praktik politik identitas.<sup>8</sup> Hal yang sama juga terlihat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Pilkada tersebut diwarnai praktik politik identitas yang terselubung. Dua fenomena tersebut tidak bisa dilepaspisahkan dari sebuah proses pengaktualisasian praktik politik identitas oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan identitas agamanya untuk melegitimasi kekuasaan.

Survei eksperimen indikator pada Januari 2016 menemukan bahwa, etnis dan agama merupakan faktor yang dipertimbangkan penduduk dalam menentukan pilihan.<sup>9</sup> Hal ini bisa ditelisik melalui pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, yang mempraktikkan etnis dan agama sebagai media untuk berpolitik. Secara tidak sadar pada saat itu pula, politik identitas secara perlahan sudah bekerja dan mewarnai Pilkada di Indonesia. Dalam hal ini agama dan etnis memiliki efek elektoral yang luas untuk memengaruhi pemilih demi meraih suara terbanyak dalam pilkada tersebut.

Apa yang dinamakan politik identitas yang berkedok agama merupakan sebuah alat yang dijadikan topeng untuk melakukan sebuah perjuangan politik. Di dalam pengaktualisasian politik identitas yang berbasis agama dapat diwujudkan dengan cara memperkaya dialektika wacana, dalam konteks kompetisi politik. Namun wacana menguatnya sentimen primodialisme tersebut berubah menjadi ajang untuk saling mengunggulkan dominasi kelompoknya atas kelompok lain. Kontestasi politik yang merebut kekuasaan tersebut seharusnya saling beradu gagasan, pikiran dan konsep yang konstruktif untuk kemajuan negara dan bukannya saling menjatuhkan lawan

---

<sup>8</sup>Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Penerbit Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2019), hlm. 11-12.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

dengan isu SARA yang terkesan menunjukkan sikap yang destruktif yang menghambat pembangunan bangsa Indonesia.

Kemajemukan yang menjadi identitas bangsa Indonesia tersebut justru terancam oleh kehadiran para elit politik yang mengatasnamakan identitas tertentu untuk memperoleh dukungannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya elit politik yang cenderung menjadikan politik identitas sebagai alat kekuatan politiknya. Dengan kata lain, para elit politik menggunakan praktik politik identitas sebagai alat kekuatan politik dan menadikan itu sebagai basis dukungan masyarakat terhadapnya. Politik identitas yang paling nampak di Indonesia adalah praktik politik identitas yang berbasis agama. Dalam konteks praktik politik di Indonesia, identitas agama seringkali dijadikan alat kekuatan politik oleh kelompok agama mayoritas. Namun demikian, terlepas dari apakah politik identitas agama itu dimunculkan oleh kelompok agama mayoritas, bahwasannya praktik politik identitas agama sebagai basis kekuatan politik telah menunjukkan betapa primitifnya bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

Politik identitas yang berbasis agama sudah menjadi alat perjuangan politik untuk menggalang dukungan dari masyarakat. Tampilnya agama dalam ruang publik menjadi suatu orientasi baru untuk mengalahkan lawan politiknya. Kehadiran agama di ruang publik memiliki pengaruh besar di dalam penentuan arah kebijakan dari suatu negara. Hal ini tentunya akan berdampak pada ketidakstabilan dalam negara dan menimbulkan berbagai macam polemik yang berakhir pada keterpecahan bangsa dan negara. Praktik politik identitas agama di Indonesia, lazimnya memanfaatkan isu-isu yang berhubungan dengan agama untuk dijadikan sebagai instrumen politik oleh sebagian elit politik untuk memperoleh kekuasaan di dalam pemerintahan negara. Elit politik berusaha meraih kemenangan dalam pemilu dengan memanfaatkan agama sebagai identitas kelompoknya untuk mengambil simpati masyarakat guna memperoleh suara mayoritas. Di sini agama memiliki efek yang sangat kuat untuk mempengaruhi pemilih demi meraih suara terbanyak di dalam pertarungan politik.

Politik identitas pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas, yang bertumpu pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.<sup>10</sup> Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat dilihat dari peran dan keberadaan agama di dalam suatu negara, di mana agama digunakan dalam membangun citra diri untuk menggalang dukungan masyarakat dengan dasar kesamaan agama.<sup>11</sup> Dengan format keagamaan, para elit pemerintahan ataupun kelompok-kelompok tertentu melandasi perjuangannya atas dasar agama. Praktik politik identitas agama, tercermin dari adanya upaya memasukkan ideologi dan juga ajaran agama tertentu ke dalam regulasi pemerintahan negara.

Dengan melihat uraian di atas, tanpa kita sadari penggunaan agama sebagai alat perjuangan politik praktis telah memecah belah umat beragama yang ada di Indonesia. Aktivistis Islam konservatif mengamini hal tersebut. Mereka mengartikulasikan bahwa, identitas nasionalis yang berbasis pada Tuhan, telah membedakan warga negara berdasarkan keyakinan agama mereka dan telah mendapatkan landasannya.<sup>12</sup> Perbedaan itu tidak tertulis di dalam kitab suci Islam, tetapi hal itu disebabkan oleh mayoritas Muslim. Mereka mengedepankan norma-norma Islam sebagai bagian dari misi untuk melindungi hak dan budaya Muslim Sunni Indonesia.<sup>13</sup> Sentimen mayoritas tersebut memengaruhi para elit politik untuk membangun bangsa dengan menggunakan agama sebagai alat kepentingan politiknya. Dengan adanya agama, para politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan bersama, yang pada akhirnya menimbulkan konflik-konflik politik yang berujung pula pada kendurnya semangat nasionalisme bangsa.

---

<sup>10</sup>Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Jakarta: Penerbit yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 20.

<sup>11</sup>Endang Sari. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Universitas Hasanuddin. Vol 2, No. 2, 2016, hlm. 155.

<sup>12</sup>Chris Chaplin, "Islam, Demokrasi dan Penciptaan Identitas Mayoritas Muslim di Indonesia Pada Abad ke-21", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiarti dan Herlambang P Wiratraman, (ed), *Demokrasi Tanpa Demos* (Semarang: LP3ES, 2020), hlm. 79.

<sup>13</sup>*Ibid.*,

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa, negara berwajah majemuk dan pluralis seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi menghadapi berbagai ancaman yang bisa memecah-belah bangsa. Pada hakikatnya praktik politik identitas agama seringkali muncul di dalam sebuah negara yang majemuk dan pluralis. Hal-hal semacam itu dapat melahirkan berbagai konflik yang berujung pada disintegrasi bangsa. Menjamin kesetabilan dan keutuhan demokrasi di tengah maraknya praktik politik identitas agama di Indonesia merupakan perkara yang tidak mudah. Kehadiran demokrasi dengan prinsip persatuan dan persamaan diyakini bisa mendamaikan keberagaman suku bangsa dan bahasa di seluruh Indonesia. Demokrasi dipercayai mampu meminimalisasi konflik yang bersinggungan dengan isu-isu politik identitas yang berbasis agama.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Di dalam perspektif bahasa, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat (pemerintahan rakyat).<sup>14</sup> Demokrasi dalam paham modern juga memuat negara yang konstitusional yang mengakui hak-hak asasi manusia, identitas sosial serta mengenal pembagian kekuasaan. Demokrasi memiliki potensi dengan membentuk peluang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk membuka jalan menuju kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari sistem demokrasi yang faktual tersebut, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menganut paham demokrasi tidak seratus persen aman dalam seluruh mekanisme pemerintahan yang dijalankan. Di sini, pertanyaan yang paling penting ialah, sejauh mana peran demokrasi di Indonesia membuka jalan menuju kehidupan yang aman, harmonis sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, adil dan makmur. Ironisnya ancaman-ancaman praktik politik identitas agama yang bersifat progresif terus menghantui demokrasi di Indonesia. Oleh

---

<sup>14</sup>Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Kebebasan* (Depok: Penerbit Koekoesan, 2007), hlm. 56.

karena itu di bawah judul **POLITIK IDENTITAS AGAMA DAN ANCAMANNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**, penulis memberanikan diri untuk mengangkat ke ruang diskursus ilmiah, ihwal bahaya dan ancaman politik identitas agama terhadap demokrasi di Indonesia.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Persoalan yang hendak dikaji oleh penulis dalam tulisan ini adalah; Bagaimana kiprah politik identitas agama di Indonesia dan apa saja ancamannya terhadap demokrasi. Pertanyaan ini merupakan inti dari seluruh persoalan dari tulisan ini. Dari pertanyaan umum ini lahir juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebagai berikut; *pertama*, mengapa praktik politik identitas agama tidak relevan dengan sistem demokrasi di Indonesia?. *Kedua*, mengapa pemerintahan yang demokratis tidak memberikan ruang untuk melakukan praktik politik identitas dalam agenda perpolitikan?.

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah, *pertama*, berguna bagi penulis sendiri. Selain latihan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, tulisan ini juga bertujuan untuk dapat memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada IFTK Ledalero, Maumere. Selain itu juga, tulisan ini sekaligus menjadi sarana bagi pembinaan dan pengembangan sikap mental, pola pikir dan pola kerja ilmiah-akademis. Bahwasannya, sebagai ilmuwan dan calon ilmuwan, saya sudah dan sedang akan diajarkan hidup dan bekerja melalui program dan tahap-tahap yang terencana dan yang harus diikuti dengan baik agar berhasil pada waktunya.

*Kedua*, menjelaskan arti dan makna politik identitas agama serta dampak buruknya terhadap keutuhan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini mestinya berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia, elit-elit politik ataupun para pemangku jabatan di dalam negara ini, supaya tidak menggunakan politik identitas agama tertentu untuk menggalang dukungan dari masyarakat dan meraih posisi tertentu

di dalam pemerintahan. Satu hal yang pasti dan juga tidak kalah penting adalah menghindari apa yang dinamakan praktik politik identitas agama yang berusaha menghancurkan demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, mengajak semua pihak baik orang-orang yang memiliki jabatan di dalam negara maupun semua warga masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari bahwa Pancasila merupakan esensi dari negara ini. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk merekatkan kembali apa yang menjadi pluralitas budaya, suku, ras dan juga agama.

*Keempat*, tulisan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang atau sekelompok orang yang menggunakan praktik politik identitas untuk mencederai citra wajah demokrasi di Indonesia. Dengan menyadari kesalahan yang dibuatnya terhadap negara seperti egoisme, etnosentrisme, sikap sewenang-wenang, ketidakadilan, kekerasan, serta diskriminasi lainnya, negara kita akan terhindar dari pelbagai ancaman-ancaman politik identitas yang memecah belah bangsa ini. Hanya dengan sikap itu, demokratisasi dari bangsa ini akan sungguh-sungguh terwujud.

#### **1.4 METODE PENULISAN**

Dalam proses menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan *analisis data sekunder*. Jenis studi yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menggali sumber-sumber terpercaya sebagai rujukan utama berupa buku-buku, majalah, serta sumber lain yang relevan dengan tema tulisan yang ditulis oleh penulis. Penulis juga menggali sumber lain seperti internet sebagai penambah sebagian dari sumber utama dari buku-buku. Semua sumber itu dijadikan landasan teoritis bagi penulis untuk memperkuat ide serta gagasan dalam menyelesaikan tulisan ini.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ini dirangkum dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut;

Bab 1, adalah Pendahuluan. Bab ini berisikan pembahasan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah landasan teori tentang politik identitas dan agama. Dalam bab ini penulis akan memaparkan selang pandang politik identitas dan agama. *Pertama*, penulis akan menguraikan konsep politik identitas. *Kedua*, penulis akan menjelaskan sejarah awal lahirnya politik identitas serta munculnya di Indonesia, lalu penulis akan menjelaskan faktor penyebab politik identitas. *Ketiga*, menjelaskan tentang konsep dasar tentang agama, hakekat agama, fungsi agama bagi manusia, serta unsur penting agama.

Bab III, paparan mengenai konsep negara demokrasi dan politik identitas di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara rinci konsep negara demokrasi di Indonesia. Pada bab ini juga, penulis akan memaparkan tentang apa saja ancaman politik identitas agama terhadap demokrasi di Indonesia. *Pertama*, penulis akan menjelaskan realitas praktik politik identitas di Indonesia. *Kedua*, penulis akan menguraikan apa saja ancaman-ancaman politik identitas agama terhadap demokrasi, yang menyebabkan masyarakat di Indonesia mengalami keterpecahan.

Bab IV, merupakan bab penutup. Penulis akan menyampaikan kesimpulan umum dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Dalam kesimpulan ini penulis juga memberikan usul dan saran terhadap praktik politik identitas agama yang berusaha mencederai demokrasi di Indonesia. Selain itu disertakan juga saran-saran penting bagi praksis kehidupan bangsa dan bernegara agar mampu menjamin demokrasi yang sehat.